

SKRIPSI

PENGAWASAN PERTAMBANGAN BATUBARA DI KOTA

SAWAHLUNTO PASCA REFORMASI REGULASI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

OLEH:

ANNISA NURUL AINI

NIM. 2110113073

Program Kekhususan: Hukum Administrasi Negara (Pk VII)



Pembimbing :

Dr. Khairani, S.H., M.H.

Sucy Delyarahmi, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg : 27/PK-VII/IV/2025

PENGAWASAN PERTAMBANGAN BATUBARA DI KOTA SAWAHLUNTO PASCA REFORMASI REGULASI

*Annisa Nurul Aini, 2110113073, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program
Khusus Hukum Administrasi Negara (PK VII), Halaman Tahun 2025,
Pembimbing Dr. Khairani, S.H., M.H. dan Sucy Delyarahmi, S.H., M.H.*

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, salah satunya adalah bahan galian batuan komoditas batubara yang terdapat di Kota Sawahlunto. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa tanah (bumi), air, dan kekayaan alam lainnya secara prinsipal dikuasai oleh negara. Oleh karena itu sejatinya hak menguasai Negara adalah mengatur, mendistribusikan peruntukan dan pengawasan. Pengawasan berfungsi untuk melindungi kegiatan pertambangan. Namun seiring dengan perkembangan regulasi saat ini, pengaturan mengenai pengawasan pun turut berubah. Pertambangan di Kota Sawahlunto memperlihatkan dampak dari adanya kegiatan pertambangan tersebut seperti kerusakan rumah warga sekitar wilayah pertambangan, kerusakan perkebunan warga, dan tercemarnya sumber air. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan pengawasan pertambangan batubara di Kota Sawahlunto Pasca Reformasi Regulasi? 2) Apa kendala dan upaya dalam pelaksanaan pengawasan oleh Perwakilan Inspektur Tambang Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Sumatera Barat?. Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan mengumpulkan data melalui wawancara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan dapat didelegasikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi melalui mekanisme pelimpahan tugas kepada Dinas ESDM Provinsi. Selama lima tahun terakhir, pelaksanaan pengawasan oleh Inspektur Tambang di Kota Sawahlunto tiap tahunnya belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya sejumlah perusahaan pemegang IUP yang belum mendapat pengawasan. Padahal setiap pemegang IUP berhak mendapatkan pengawasan setidaknya satu kali dalam setahun, kondisi ini menunjukkan lemahnya mekanisme pengawasan. Adapun kendala yang dihadapi yaitu pola pikir perusahaan tambang yang hanya cenderung pada pencapaian target produksi dan keuntungan dan terakhir, adanya campur tangan politik, minimnya anggaran dana untuk melakukan pengawasan lapangan dan ditambah dengan adanya kebijakan efisiensi pelaksanaan pengawasan digunakan dengan metode daring, serta adanya kekosongan jabatan Pejabat Pengawas Tambang.

Kata Kunci: *Pengawasan, Perusahaan Tambang, Regulasi, Pertambangan, Izin Usaha pertambangan*

SUPERVISION OF COAL MINING IN SAWAHLUNTO CITY FOLLOWING REGULATORY REFORM

Annisa Nurul Aini, 2110113073, Faculty of Law, Andalas University, Special Program in State Administrative Law (PK VII), Year Page 2025, Supervisor Dr. Khairani, S.H., M.H. and Sucy Delyarahmi, S.H., M.H.

ABSTRACK

Indonesia is a country that has an abundant wealth of natural resources, one of which is coal commodity rock excavation materials found in Sawahlunto City. Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution emphasizes that land (earth), water, and other natural resources are principally controlled by the state. Therefore, the true right of the State to control is to regulate, distribute allocations and supervision. Supervision serves to protect mining activities. However, along with the development of current regulations, the regulation regarding supervision has also changed. Mining in Sawahlunto City shows the impact of mining activities such as damage to residents' houses around the mining area, damage to residents' plantations, and pollution of water sources. The formulation of the problem in this study is 1) How is the implementation of coal mining supervision in Sawahlunto City after the Regulation Reform? 2) What are the obstacles and efforts in the implementation of supervision by the Representative of the Mine Inspector of the Ministry of Energy and Mineral Resources of West Sumatra?. Based on the formulation of the problem, this study uses an empirical juridical method by collecting data through interviews. The results of this study conclude that the implementation of supervision is carried out by the Central Government and authority can be delegated to the Provincial Government through the mechanism of delegating tasks to the Provincial Energy and Mineral Resources Office. For the past five years, the implementation of supervision by the Mine Inspector in Sawahlunto City every year has not been running optimally. This can be seen from the fact that there are still a number of companies holding IUP that have not received supervision. Even though every IUP holder has the right to receive supervision at least once a year, this condition shows the weakness of the supervision mechanism. The obstacles faced are the mindset of mining companies which only tend to achieve production and profit targets and lastly, there is political interference, the lack of funds to carry out field supervision and coupled with the efficiency policy of implementing supervision using online methods, as well as the vacancy of the position of Mining Supervisory Officer.

Keywords: Supervision, Mining Company, Regulation, Mining, Mining Business License